

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun, perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda bersifat lokal di daerah masing-masing. Dalam perlawanan rakyat tersebut, tidak lepas dari peran ulama sebagai pemimpin agama sekaligus memimpin untuk melawan kolonial Belanda. Pemimpin atau tokoh agama Islam yang menjadi yang berjuang sebelum tahun 1900an antara lain Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Antasari. Pada awal tahun 1900an, mulai ada rasa persaudaraan dan nasionalisme dengan berdirinya organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan maupun politik yang berbasis keislaman namun menjunjung rasa kebangsaan/nasionalisme. Salah satu organisasi yang berdiri adalah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keislaman yang didirikan oleh para ulama yang ingin melestarikan nilai-nilai keislaman ahlus sunnah wal jamaah sekaligus berjuang untuk kemerdekaan bangsa dari penjajahan Belanda maupun Jepang.

Perjalanan NU dalam perpolitikan nasional sangat menarik untuk dikaji, hal ini karena bila kita melihat latar belakang NU berdiri yakni berasal dari *Komite Hijaz* yang merupakan kumpulan ulama yang bermaksud “me-lobby” raja Arab Saudi saat itu agar memperbolehkan madzhab-madzhab tetap berkembang dan bisa ikut dalam ibadah haji.

Namun, seiring dengan perjalanan bangsa saat itu yang sedang dijajah Belanda, maka NU pun tidak ketinggalan untuk ikut *jihad fii sabilillah* melawan Belanda. Saat menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, tokoh NU pun – yakni KH. Wahid Hasyim – turut merumuskan suatu dokumen yang bersejarah bagi bangsa yaitu Piagam Jakarta yang didalamnya berisi sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Pada masa awal kemerdekaan, hal yang sangat monumental adalah ijihad politik NU yang dikenal sebagai “Resolusi Jihad” yang menyangkut perlunya membela negara pada masa awal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Pada waktu itu bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Sekutu dan juga antek-anteknya. Belanda masih ingin menjajah Indonesia. Di tengah suasana genting seperti ini, maka NU mengeluarkan ijihad politik tersebut.

Pada saat itulah para pemimpin NU, syuriah dan tanfidziyah, melakukan sidang di Surabaya yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. KH. Hasyim Asy’ari memberikan taushiyah agar semua warga Indonesia melakukan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib untuk dipertahankan.
- 2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan dipertahankan.
- 3) Musuh Negara Republik Indonesia terutama Belanda yang datang kembali dengan membonceng tentara Sekutu (Inggris), dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
- 4) Umat Islam Indonesia terutama warga Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
- 5) Kewajiban itu adalah jihad yang menjadi kewajiban orang Islam (fardlu ain) yang berada pada radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan untuk melakukan shalat jama’dan qashar). Adapun mereka yang berada di luar radius 94 km tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam radius 94 km tersebut.

Melalui resolusi jihad yang difatwakan oleh NU ini, maka sesungguhnya bisa dipahami bahwa semenjak dahulu NU memang selalu berada di garda depan dalam membela negara. Makanya, jika NU di kelak kemudian hari selalu tampil dalam membela negara, tentu hal ini merupakan bagian dari roh jihad NU bagi negara bangsa. Resolusi jihad adalah sesuatu yang inspiring bagi NU dalam ikut serta membela negara dalam keadaan yang paling sulit sekalipun.

Ketika pemerintahan Soekarno, kembali NU pun ikut membantu dalam pemerintahan. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang multi partai yang memperbolehkan rakyat mendirikan partai politik, maka NU pun mendirikan partai sendiri. Mulai saat itu NU “berubah” menjadi organisasi politik, namun tetap tidak meninggalkan ke-ormas-annya. Ternyata dalam pemilu pertama tahun 1955 NU meraih suara yang cukup signifikan, hal ini karena NU memiliki basis massa yang cukup banyak khususnya di Pulau Jawa.

Menurut Syam (2012) dalam blog resmi IAIN Sunan Ampel, bahwa semasa Orde Lama Nahdlatul Ulama memperoleh label yang bermacam-macam. Misalnya dianggap menerapkan ijtihad politik akomodatif, mengembangkan ijtihad politik oportunis, NU melaksanakan ijtihad politik pragmatis dan sebagainya. Labeling ini diberikan kepada NU karena sikapnya yang mengikuti jejak langkah pemerintah Indonesia dalam kebijakan politik yang mengakomodasi semua kepentingan. Salah satu di antaranya adalah tentang nasionalisme, agama dan komunisme, yang kemudian disingkat Nasakom.

Tokoh-tokoh NU mengedepankan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, salah satunya adalah Habib Lutfi yang dalam ceramah sering memaparkan tentang NKRI harga mati dan pentingnya menjaga Indonesia. Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj pun telah lama menulis buku tentang Islam kebangsaan (Fiqih Demokratik Kaum Santri) pada tahun 1999, tulisan-tulisan serta ceramah beliau banyak yang mengenai tentang penguatan rasa nasionalisme di Indonesia.

Saat reformasi marak terjadi gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia, angin segar kebebasan yang dihembuskan seiring dengan digulirkannya reformasi telah melahirkan sebuah fenomena baru yang mengguncang rasa nasionalisme Indonesia sebagai suatu bangsa Setiawan (2007: vi). Fenomena tersebut diawali dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam (FPI). Mereka hadir dalam konteks kampanye “penegakan dan penerapan syariat Islam”, “mendirikan negara Islam”, sampai “pembentukan Khilafah Islamiyah”. Selain itu pula, perjuangan politik

yang bernuansa agama Islam pun dilakukan oleh partai-partai Islam dengan munculnya gerakan syariat Islam secara formal dalam bentuk Peraturan Daerah.

Saat ini tantangan Nahdlatul Ulama adalah adanya dua kelompok besar yaitu kelompok Islam radikal dan kelompok liberal (Setiawan, 2007:vii). Kelompok Islam radikal kerap menimbulkan keresahan melalui aksi terorisme dan melarang praktik-praktik keagamaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia serta gerakan formalisasi syariat Islam dan munculnya kelompok liberal yang dicetuskan oleh anak-anak muda NU sendiri.

Menurut Ahmad Baso (2013: 99) pelemahan terhadap NU tersebut melalui proses dan sejumlah cara:

- 1) Melalui pendekatan kelembagaan
- 2) Melalui pendekatan isu HAM, pluralisme dan toleransi maupun isu kesetaraan gender.
- 3) Melalui pendekatan kurikulum pesantren dan madrasah. Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan kepada sejumlah kiai atau anak kiai yang berpengaruh dan punya strategis dalam membenahan kurikulum pesantren. Sasaran tembaknya adalah kitab-kitab kuning yang menghajarkan jihad. Padahal ajaran jihad dalam lingkungan pesantren berarti jihad membela agama, negara dan bangsa. Penggantinya, adalah kurikulum *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), pendidikan pluralisme atau pendidikan “fiqih toleransi”. Seperti yang ditawarkan beberapa NGO NU ke dalam pendidikan pesantren. Kalau ajaran jihad tersebut diganti dengan *civic education*, maka komunitas pesantren pun akan kehilangan karakter kebangsaannya, dan tidak lagi membela agama, bangsa, dan negara. Padahal ajaran “jihad nasionalis” seperti yang diajarkan NU justru luput dalam analisis-analisis kalangan Orientalis dan Pengamat NU.
- 4) Melalui pendekatan media dan permainan isu.

Apabila melihat empat hal tersebut di atas, apalagi penjelasan dalam pendekatan kurikulum pesantren dan madrasah, seolah-olah Pendidikan Kewarganegaraan “bertentangan” dengan kurikulum pesantren. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan tidak sempit, ada dimensi sosio kultural dalam bentuk *community civic education*, artinya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berada dalam lingkup persekolahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Cogan dalam menjelaskan perbedaan istilah antara *civic education* dan *citizenship education*. Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah

asing *civic education* atau *citizenship education*. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*” (Cogan, 1998:4), artinya bahwa PKN adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup :

“...*both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen*” (Cogan, 1998:4).

Artinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Winataputra (dalam Winataputra & Budimansyah, 2012: 73) :

pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dalam konteks *Citizenship Education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan, sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inern dari instrumenasi serta praksis pendidikan nasioanal dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah di kelola oleh pemerintah sebagai suatu *crash program*. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia secara historis-pedagogis dan historis-epistemologis dimulai dari tahun 1962 dengan istilah *Civics* dalam

kurikulum SMA yang berisi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Winataputra, 2012: 3). Berikutnya pada kurikulum 1968 dan 1969 dikenal istilah *civics* pada kurikulum SD dan pendidikan kewargaan negara pada kurikulum SMP 1968. Pada kurikulum 1975, istilah yang digunakan adalah Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sesuai sebagaimana diuraikan dalam P4. Dalam Kurikulum 1994 digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Pancasila sebagai *core*-nya dan Pendidikan Kewargaan sebagai *accompaniment*-nya. Saat berlakunya kurikulum KTSP 2006, istilah yang digunakan adalah PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Sekarang, sejak Juli 2013 berlaku kurikulum 2013 yang dilaksanakan di beberapa sekolah sasaran, istilah yang digunakan kembali seperti kurikulum 1994 yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Perbedaan penggunaan setiap berlakunya kurikulum baru, menjadi salah satu faktor *civics education* mengalami krisis konseptual. Hal ini mengakibatkan paradigma yang sempit terhadap *civic education* oleh peserta didik, guru, maupun masyarakat, sehingga PPKn/PMP pernah masuk dalam Ujian Nasional atau saat itu bernama Ebtanas.

Menurut Winataputra (2012: 13), ada beberapa kelemahan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang mendasar yaitu:

- a. Kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan.
- b. Penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik.
- c. Ketidakkosistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
- d. Keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya.

Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan bukan hanya di persekolahan. Pendidikan kewarganegaraan atau *Citizenship Education* menurut Winataputra (2012:14) mencakup tiga domain yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosio kultural. Untuk menjelaskan ketiga domain tersebut, Winataputra mengemukakan bahwa:

Ketiga domain tersebut satu sama lain memiliki keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi *civic virtue and civic culture* yang mencakup *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment*, dan *civic competence* (Winataputra, 2012:14).

Secara yuridis formal, domain akademik dan domain kurikuler PKn diatur dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, dalam lampiran dijelaskan bahwa :

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai suatu program pendidikan, menurut Winataputra (2012:257) menjelaskan salah satu domain sosio kultural dengan istilah *community civic education*:

*Community civic education* merupakan dimensi sosial kultural dalam pengembangan *smart and good citizens* untuk pembelajar yang sangat luas, beragam. Substansi dan proses pendidikannya bersifat : *contextually customized, fleksible, less structured, enculturation-oriented*. yang ada di masyarakat atau bisa disebut *Community Civic Education* yang dapat dikembangkan untuk berbagai komunitas masyarakat bangsa dan negara, misalnya untuk pejabat negara dan birokrat (*administration civic education*), politisi (*political education*), akademisi (*proffesional civic education*), praktisi/teknisi wartawan sdb (*practitioner civic education*), pejabat pada pemerintah daerah, kelompok masyarakat (*pupular civic education*) (Winataputra, 2012: 257-258).

Apabila menyimak penjelasan tentang *citizenship education* di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya di persekolahan, melainkan juga bisa dikembangkan pada kelompok masyarakat, salah satu kelompok masyarakat yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), NU banyak berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam menjunjung dan mengembangkan nasionalisme di Indonesia. Beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa NU mengembangkan nasionalisme di Indonesia adalah :

Penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak yang mengkaji NU dari berbagai bidang, namun penelitian NU yang secara khusus dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dalam komunitas NU belum ada yang melakukan, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti



merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBINA NASIONALISME INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR*** (Studi Kasus Tentang Makna Nasionalisme Menurut Para Kiai di PBNU dan PCNU Kabupaten Brebes).

## 1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana Organisasi NU Berperan Sebagai *Community Civic* Dalam Membina Nasionalisme Indonesia?”. Dari masalah tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa rumusan masalah berikut :

- 1) Hal apakah yang menjadi subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia?
- 2) Bagaimana pemikiran NU dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*)?
- 3) Bagaimana sikap dan langkah perjuangan NU yang sesuai khittah 1926 dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia?
- 4) Bagaimana pandangan NU tentang organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan khilafah islamiyah di Indonesia?
- 5) Bagaimana peran NU sebagai organisasi perjuangan nahdliyin terhadap pembinaan moral bangsa Indonesia?
- 6) Bagaimana pandangan NU terhadap upaya untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *baldatun thayibatun wa robbun ghofur* (negara yang adil dan makmur negara adil dan makmur di bawah *maghfirah* (ampunan) Allah)?
- 7) Hal-hal apa saja yang menjadi kendala NU dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia ?

## 1.3.Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Umum

Mohamad Alwi Lutfi, 2014

PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBINA NASIONALISME INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui peran NU dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia..

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian antara lain :

- a) Untuk mengetahui subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pemikiran NU dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizens*).
- c) Untuk mengetahui sikap dan langkah perjuangan NU yang sesuai khittah 1926 dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia.
- d) Untuk mengetahui pandangan NU tentang organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan khilafah islamiyah di Indonesia.
- e) Untuk mengetahui peran NU sebagai organisasi perjuangan nahdliyin terhadap pembinaan moral bangsa Indonesia.
- f) Untuk mengetahui pandangan NU terhadap upaya untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *baldatun thayibatun wa robbun ghofur*.
- g) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi NU dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia.

### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Tailor (Moleong, 2004: 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Observasi, penulis datang langsung mengamati ke lapangan (tempat penelitian).
- b) Studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data atau informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c) Wawancara, yaitu pengumpulan data berdasarkan Jawaban responden yang diajukan peneliti secara lisan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis merumuskannya sebagai berikut:

#### 1.5.1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan terutama mengenai *community civic*.

#### 1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di luar persekolahan khususnya dalam komunitas pendidikan kewarganegaraan.
- b. Bagi Nahdlatul Ulama, penelitian ini berguna sebagai khasanah kajian tentang Nahdlatul Ulama yang belum dikaji oleh penelitian lainnya. Selan itu untuk membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai salah satu *community civic education*.
- c. Bagi negara Indonesia, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga negara.

### 1.6. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap sumber penelitian merujuk pada rumusan masalah :

- (1) Hal apakah yang menjadi subjek pemikiran NU dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia?
  - a. Bagaimanakah paham nasionalisme dalam pandangan NU?
  - b. Apa yang menjadi dalil dalam melaksanakan sikap nasioanalisme di Indonesia?
- (2) Bagaimana pemikiran NU dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizenship)?

- a. Bagaimana perspektif NU mengenai “warga negara yang baik dan cerdas”?
  - b. Bagaimana upaya untuk mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas tersebut?
- (3) Bagaimana sikap dan langkah perjuangan NU yang sesuai khittah 1926 dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia?
- a. Bagaimana langkah NU dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme Indonesia?
  - b. Bagaimana kaitan antara khittah 1926 dengan nasionalisme Indonesia?
- (4) Bagaimana pandangan NU tentang organisasi-organisasi Islam internasional yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia?
- a. Bagaimana tanggapan NU dalam menghadapi golongan yang beranggapan sistem negara kita (Pancasila dan UUD 1945) adalah *thoghut*?
  - b. Apa upaya dan media apa yang dimiliki NU untuk menghadapi paham tersebut agar rasa nasionalisme warga NU tetap terjaga ?
  - c. Bagaimana saran NU terhadap pembelajaran PPKn untuk menangkalkan paham-paham yang anti Pancasila ?
- (5) Bagaimana peran NU sebagai organisasi perjuangan nahdliyin terhadap pembinaan moral bangsa Indonesia?
- a. Bagaimana NU menilai tentang perkembangan moral bangsa Indonesia?
  - b. Bagaimana upaya NU untuk membina moral bangsa Indonesia?
- (6) Bagaimana pandangan NU dalam mewujudkan Indonesia yang sesuai ayat Alquran *baladatun thayibatun wa robbun ghofur*?
- a. Bagaimana NU memandang tentang ayat *baladatun thayibatun wa robbun ghofur*?
  - b. Bagaimana cara untuk mewujudkan agar Indonesia termasuk negara yang sesuai ayat *baladatun thayibatun wa robbun ghofur*?
- (7) Bagaimana kendala yang dihadapi NU dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia ?

- a. Apakah kendala yang dihadapi NU dalam memperjuangkan nasionalisme?
- b. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut?

### 1.7.Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah organisasi masyarakat yang berbasis agama yaitu Nahdlatul Ulama, adapun pihak-pihak yang akan menjadi sumber data dalam penelitian adalah:

- 1) Tokoh/Ulama NU dalam pengurusan PBNU, antara lain :
  - a) Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A (Ketua Umum PBNU)
  - b) KH. Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D (Tokoh Muda NU/Wakil Ketua MUI)
  - c) Habib Luthfi Bin Yahya (Rais Syuriah PBNU)
  - d) Ahmad Baso (Wakil Ketua PP Lakspedam-NU)
- 2) Tokoh/Ulama NU di Kabupaten Brebes, yaitu:
  - a) KH. Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah
  - b) KH. Labib Shoqiq
  - c) KH. Aminudin Afif
  - d) KH. Sayid Abdurahman
  - e) KH. Athoilah Syatori, S.E., M.Si
  - f) KH. Subhan Makmun
  - g) KH. Mas Mansur Tarsudi

### 1.8.Rancangan Analisis Data

Analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (Moleong, 2004:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Seiddel (Moleong, 2004:248) proses analisis data berjalan seperti berikut :

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
- c) Berpikir, dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.